

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isu yang berkaitan dengan lingkungan merupakan salah satu isu yang menjadi titik fokus utama yang harus dituntaskan. Sejalan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya yang ada di Indonesia, tentunya akan memberikan pengaruh terhadap kondisi lingkungan yang ditempati. Setidaknya dalam kurun waktu satu tahun terdapat banyak bencana yang terjadi baik itu dikarenakan faktor alam ataupun faktor manusia. Bencana adalah suatu peristiwa ataupun rangkaian dari banyaknya peristiwa yang terjadi akibat faktor alam dan manusia dan/atau keduanya yang mengakibatkan jatuhnya korban dan penderitaan manusia, kerugian materil, rusaknya lingkungan, rusaknya fasilitas publik, rusaknya sarana dan prasarana, serta menimbulkan gangguan pada tata kehidupan di dalam masyarakat (Sudibyakto, 2011).

Seperti yang umumnya terjadi di mana banyak pihak yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan terhadap lingkungan namun dengan cara yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan banyak kerusakan terhadap lingkungan. Beberapa kasus menunjukkan adanya oknum yang memanfaatkan dan mengelola lingkungan dengan cara yang tidak benar ataupun tidak sesuai sebagaimana mestinya. Seperti halnya di beberapa provinsi di Indonesia, terjadi beberapa bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia yang meliputi pengerusakan hutan dengan cara pembakaran hutan secara liar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan hal ini

umumnya dipicu oleh kebutuhan manusia yang kian hari kian meningkat pula, diperparah dengan adanya egoisme masyarakat sehingga melakukan Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan memperburuk kondisi lingkungan.

Berdasarkan letak secara astronomis Indonesia terletak di daerah beriklim tropis, yang mana hal ini ditandai dengan suhu hangat dan sinar matahari yang menyinari sepanjang tahun di Indonesia. Ketika musim kemarau tiba, umumnya hal ini akan menyebabkan kekeringan di seluruh wilayah di Indonesia. Di Indonesia sendiri musim kemarau umumnya terjadi sepanjang April hingga Oktober, kondisi ini berkaitan dengan fenomena El Nireno. Saat Fenomena El Nino Terjadi, Perairan pantai selatan akan mengalami peningkatan suhu dan menimbulkan perubahan cuaca ekstrim secara global. El Nino Sendiri akan menyebabkan penghambatan datangnya musim hujan, sehingga ketika masa ini akan terjadi arus panas, udara kering, gagal panen dan berbagai risiko kemarau lainnya akan terjadi. Hal ini dapat memicu hutan menjadi lebig mudah terbakar akibat kondisi lingkungan yang gersang dan tandus. Di Indonesia, kabut asap merupakan salah satu bencana yang kerap melanda dan terjadi umumnya pada musim kemarau, yaitu dalam rentang waktu di bulan agustus hingga oktober yang mana pada masa ini adalah masa peralihan atau masa transisi (Rasyid, 2014).

Salah satu isu pokok lainnya yang paling sering diperbincangkan berkaitan dengan kebakaran hutan adalah kabut asap sebagai akibat yang cukup serius dari adanya kerusakan alam ataupun eksploitasi terhadap hutan. Kabut asap sendiri merupakan salah satu bentuk polusi yang tercipta dari kebakaran hutan dan polusi kabut asap ini adalah kasus pencemaran udara berat, hal ini disebabkan oleh degradasi

ataupun yang biasa disebut sebagai penurunan kualitas hutan seperti adanya aktivitas-aktivitas *illegal logging* dan juga deforestasi seperti konversi lahan-lahan hutan yang digunakan untuk Perladangan, perkebunan maupun pemukiman warga dengan skala yang besar. Kondisi iklim umumnya juga menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya kebakaran hutan, yakni pada musim kemarau ataupun musim di mana hujan sangat jarang turun di suatu daerah. Sebagian besar kebakaran disebabkan oleh aktivitas manusia dan pemanasan global yang menyebabkan bumi menjadi lebih kering, api lebih mudah menyebar dan membakar, namun perubahan iklim bukan pemicunya utamanya melainkan aktivitas dari manusia itu sendiri (Purnomo, 2019)

Kebakaran yang terjadi pada hutan adalah salah satu permasalahan lingkungan yang sangat krusial dan telah menjadi perhatian baik secara lokal maupun global. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi sudah lama di usahakan baik oleh pemerintah setempat ataupun masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan tersebut namun keberhasilannya relatif rendah (Cahyono et al, 2015). Saat terjadi kebakaran, api yang muncul dapat berasal dari jenis tanah apapun, namun asap yang dihasilkan dari tanah gambut berkali lipat lebih berbahaya dibandingkan lahan biasa. Api yang disebabkan oleh pembakaran lahan gambut 90% akan menjadi sumber timbulnya kabut asap. Hal ini dikarenakan lahan bergambut akan menghasilkan partikel sebanyak 3 hingga 9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanah lainnya. Umumnya lahan bergambut terletak di dataran rendah.

Abu Bakar Radhiyallahu'anhu pernah berpesan saat ia mengirim pasukan ke Syam, "dan janganlah engkau menenggelamkan pohon kurma atau bahkan membakarnya. Jangan menebang ternak atau menebang pohon yang berbuah. Jangan

merusak tempat ibadah, Jangan membunuh anak-anak, orang tua dan wanita.” (HR Ahmad). Dalil ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga lingkungan dan tidak mencemarinya dengan cara apapun, termasuk dengan membakar pohon. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt sangat sempurna. Untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluk-Nya di muka bumi, Allah telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengelolanya dengan cara yang baik sehingga tidak terjadi bencana di muka bumi (QS. Hud [11]: 61). Manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi, karena manusia mempunyai potensi dan memiliki kesiapan untuk menjadi makhluk yang membangun. Memakmurkan bumi pada hakikatnya adalah pengelolaan lingkungan secara benar dengan cara melaksanakan pembangunan dan mengolah bumi. Karena alam harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak punah sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Berkaitan dengan isu lingkungan seputar kebakaran hutan yang menyebabkan bencana kabut asap tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan. Terlebih bencana ini adalah bencana tahunan yang kerap terjadi di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi sendiri adalah salah satu wilayah yang luasan daerahnya didominasi oleh lahan gambut dan rawa. Bila mengacu kepada data yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Indonesia sendiri, luasan lahan gambut nya berkisar hingga 22,5 juta hectare (ha) atau jika diperkirakan adalah 10,8% dari luas wilayah daratan yang ada di Indonesia, hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan luas lahan gambut terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Berdasarkan pada data yang dipublikasi oleh Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah, setidaknya 35% Lahan gambut tersebut berlokasi di Pulau

Sumatera, umumnya berada di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. 27,8% Terdapat di Kalimantan, dan sisanya berlokasi di Papua. Sebagai salah satu akibat dari penebangan drainase terdapat banyak lahan gambut di Indonesia yang telah mengalami deforestasi dan degradasi yang luas. Berbagai inisiatif restorasi telah dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan degradasi ini, namun sampai saat ini hanya terdapat beberapa refleksi yang koheren tentang efektivitas dari intervensi ini (Dohong, et al. 2018).

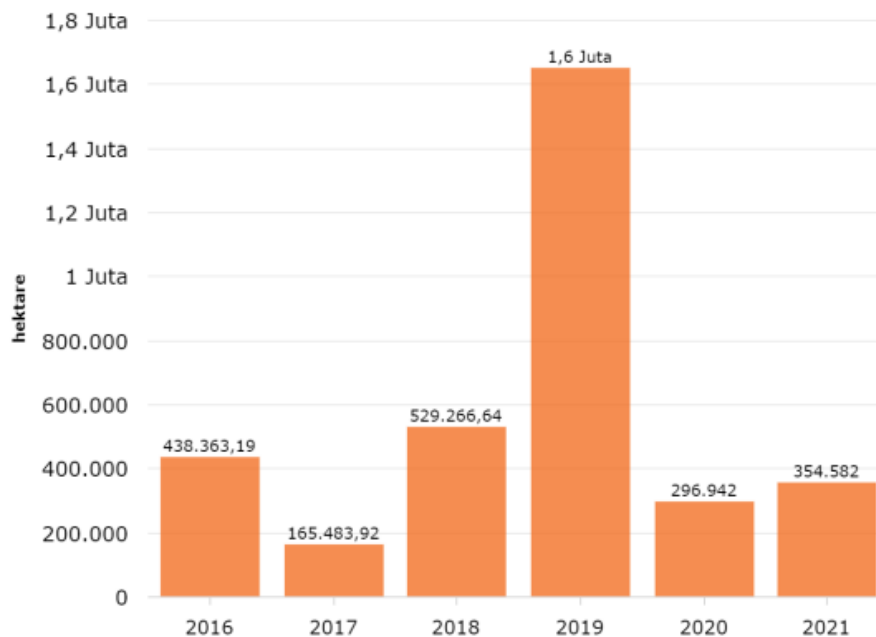
Lahan gambut merupakan bagian dari sumber daya alam yang pada hakekatnya memiliki fungsi untuk melestarikan sumber daya air, menekan banjir, mencegah instrusi air laut, sebagai pendukung berbagai keanekaragaman Hayati, pengendali iklim (melalui kemampuannya dalam menyerap), menyimpan karbon, dan masih banyak manfaat maupun fungsi lainnya dari lahan rawa gambut. Luasan lahan gambut yang ada di Provinsi Jambi berkisar yaitu 716,839 ha mencakup pula wilayah dengan tanah mineral bergambut, hal ini menjadikan luasan lahan gambut yang tersebar di Provinsi Jambi adalah sebaran terluas ketiga yang ada di pulau Sumatera. Berdasarkan data yang ada sebaran yang relatif luas berada di wilayah yang tercakup dalam empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 266,000 ha (37,2%), Kabupaten Batanghari seluas 258,000 ha (35,9%), Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 142,000 ha (19,8%), dan Kabupaten Sarolangun seluas 41,000 ha (5,8%). Sedangkan untuk sisanya di beberapa wilayah kabupaten lainnya luasan lahan gambut relatif sempit dan tidak terlalu luas yaitu di wilayah Kabupaten Merangin yang hanya sekitar 3,500 ha, Kabupaten Kerinci seluas 3,100 ha, Kota Jambi seluas 2,100 ha dan wilayah Bungo-Tebo hanya berkisar 780 ha.

Kawasan bergambut yang berada di luar kawasan hutan memiliki luasan yang lebih besar dibandingkan yang terletak di kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi. Hutan rawa gambut yang berada dalam kawasan hutan, yang mana disebut juga sebagai kawasan konservasi memiliki luasan sebesar 154,338,40 ha, Hutang Lindung dengan luasan 39,943,30 ha, Hutan Produksi seluas 155,269,80 ha. Sedangkan untuk wilayah bergambut yang berada di luar kawasan hutan yang mana juga merupakan kawasan budidaya memiliki luas sebesar 386,675,70 ha. (BIPHUT Jambi, 2017) Jika melihat kembali ke belakang, berdasarkan pada data yang ada, Provinsi Jambi menyumbang setidaknya 57 juta ton karbon emisi. 85% dihasilkan dari eksploitasi lahan gambut (Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2012). Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu daerah kabupaten dengan luasan hutan gambut terbesar yang ada di Provinsi Jambi memiliki kawasan cagar alam seluas 3.892 ha, Taman Nasional seluas 138.242 ha, Taman Hutan Raya seluas 3.995 ha, Hutan Gambut 23.748 ha, Sisanya seluas 54.936 ha merupakan wilayah Hutan produksi. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab kuat mengapa kawasan di Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang sangat rentang terhadap risiko kebakaran hutan, dan bencana kabut asap, didukung pula dengan tindakan egoisme masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan merusak lingkungan hutan.

Kabut asap yang disebabkan oleh bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Jambi tentunya akan memberikan dampak pada sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di Provinsi Jambi, dalam hal ini beberapa pihak melakukan berbagai mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi efek buruk yang disebabkan oleh tebalnya kabut asap yang mencemari udara, mitigasi dimaksudkan

untuk mencari jalan keluar ataupun solusi dari permasalahan baru yang ditimbulkan oleh fenomena Kabut asap akibat Pembakaran hutan, dalam penelitian ini penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan di dalam masyarakat akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan, dan bagaimana pandangan maupun persepsi masyarakat yang terdampak dengan mengukur *willingness to pay* mereka dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan mereka untuk menanggulangi bencana kabut asap tersebut.

Pada penelitian ini lokasi yang diambil adalah Provinsi Jambi, yang merupakan salah satu provinsi yang terletak di pulau Sumatera, Indonesia. Dengan jumlah penduduk sebesar 3,4 Juta jiwa yang tersebar di sepanjang wilayah dengan luas wilayah kurang lebih 5 juta ha, Dan 2,1 juta ha merupakan kawasan hutan dan 716,839 ha merupakan kawasan berlahan gambut. Secara geografis Provinsi Jambi terletak di daerah dengan kawasan hutan yang kaya dan tersebar di banyak wilayah di provinsi ini, catatan terperinci dan lebih mendetail mengenai keadaan hutan yang ada di Provinsi Jambi seperti yang telah dilaporkan oleh lembaga KK Warsi yang telah menorehkan catatan catatan kelam tentang pengelolaan kebijakan lingkungan yang ada di wilayah ini sehingga berbagai masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan kerap kali terjadi khususnya yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah kasus kebakaran hutan yang mengakibatkan asap kabut sehingga memberikan dampak buruk pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.



Sumber : SIPONGI – Karhutla Monitoring Sistem  
<http://sipongi.menlhk.go.id>

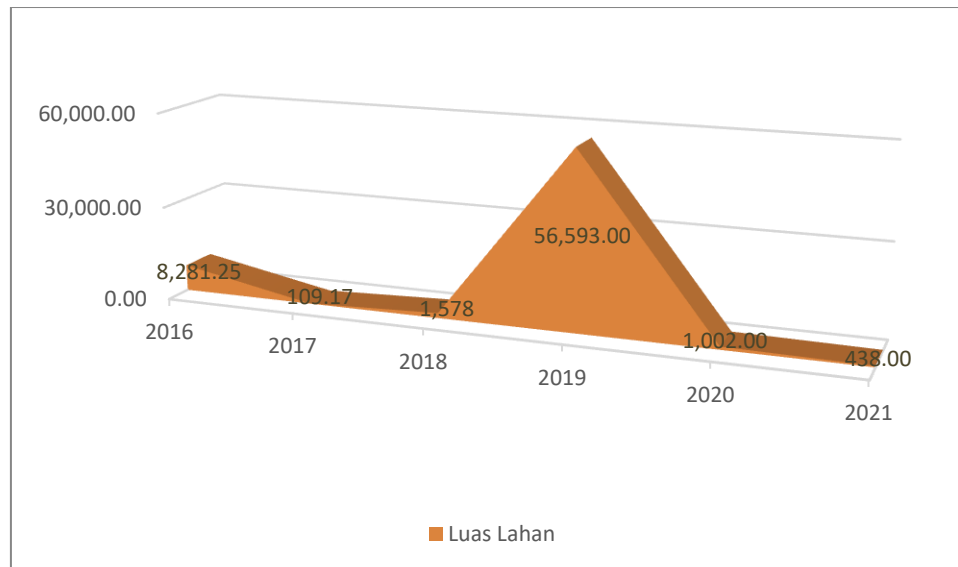
**Gambar 1.1**

Luasan wilayah terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat sebaran kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai ratusan bahkan hingga jutaan hektar. Kebakaran hutan dan lahan terparah yang pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,6 juta ha hutan dan lahan terbakar. Kebakaran hutan dan lahan ini secara dominan terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan sendiri didominasi oleh wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan di wilayah Sumatera didominasi oleh wilayah Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi. Meskipun terjadi penurunan signifikan ada tahun berikutnya yaitu tahun 2020, namun data menunjukkan kembali terjadi kenaikan di tahun 2021 yaitu seluas 354.582 ha hutan dan lahan terbakar. Sedangkan di Provinsi



Jambi sendiri, secara spesifik kebakaran terparah juga terjadi pada tahun 2019 dalam kurun waktu 5 tahun terkahir. Dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini:



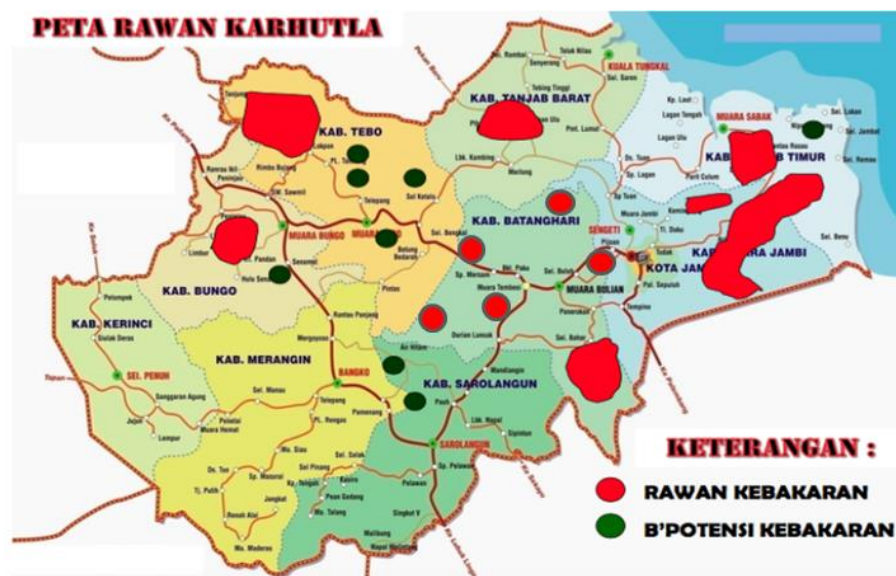
Sumber: SIPONGI – Karhutla Monitoring Sistem  
(<http://sipongi.menlhk.go.id>)

**Gambar 1.2**

Luasan wilayah terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

Pada Gambar 2.2 dapat dilihat luasan lahan yang terbakar sepanjang tahun 2016 hingga 2021. Dimana puncak terparah terjadi pada tahun 2019 dengan luasan lahan dan hutan yang terbakar mencapai 1,6 Juta Hektare di seluruh Indonesia. Provinsi Jmabi menjadi salah satu penyumbang terparah untuk angka tersebut di tahun 2019, seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 2. Pada tahun 2016 terjadi kasus yang cukup serius dengan angka Luasan Lahan dan Hutan terbakar yang luas hingga mencapai 8.281.25 ha. Meskipun pada tahun-tahun selanjutnya telah terjadi penurunan angka kebakaran namun bencana yaitu pada tahun 2017 seluas 109,47 ha dan tahun 2018 terjadi kenaikan luas lahan yang terimbas sebesar 1.578 ha yang mana ini

menunjukkan bahwa risiko luasan lahan yang terbakar masih tetap terjadi di Provinsi Jambi di tiap tahunnya, hingga puncaknya pada tahun 2019 kembali terjadi lonjakan yang sangat ekstrim mencapai 56.593,00 ha Hutan dan Lahan terdampak akibat pembakaran hutan. Hal ini umumnya berspusat di wilayah dengan kawasan bergambut. Berikut ini adalah peta persebaran daerah kabupaten dan kota yang termasuk pada level “Rawan Bencana Karhutla”



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (<https://kehutanan.jambiprov.go.id/>)

**Gambar 1.3**

Peta Rawan Karhutla Provinsi Jambi 2021

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa terdapat tujuh titik utama yang dikategorikan sebagai daerah yang rawan terhadap risiko Karhutla di Provinsi Jambi, yaitu meliputi daerah di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Batanghari. Dengan mengacu pada laporan yang tercatat oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, di sepanjang delapan bulan pertama di tahun 2019 setidaknya tercatat telah

terjadi 300.000 ha lahan yang terkena dampak dari karhutla. Tercatat setidaknya Pada minggu ke-3 di bulan September saja telah terjadi lonjakan peringatan kebakaran di Indonesia. Dengan mengacu pada laporan yang telah dilampirkan oleh *Global Forest watch*, Terdapat setidaknya 8.093 peringatan ataupun indikasi kebakaran yang tercatat dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dari rata-rata periode indikasi terjadinya karhutla di tahun-tahun sebelumnya.

Kasus kebakaran hutan merupakan kasus tahunan yang sering terjadi di Provinsi Jambi aktivitas eksploitasi lahan menjadi salah satu sebab utama banyak terjadinya kebakaran hutan yang mana hal ini tentunya memicu banyak persoalan lingkungan. Eksploitasi lahan dalam bentuk pembakaran pada hutan yang dilakukan secara ilegal menyebabkan beberapa dampak negatif terutama memunculkan asap kabut dalam jumlah yang besar sehingga dapat membahayakan dan melemahkan kualitas udara yang ada di Provinsi Jambi sehingga hal ini memberikan efek-efek negatif terhadap kegiatan maupun kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di sana, setidaknya tercatat pada tahun 2015 sebesar 1.300 ha termasuk taman nasional yang ada di Provinsi Jambi menjadi sasaran dari pembakaran hutan secara ilegal.

Provinsi Jambi menjadi empat besar provinsi dengan keberadaan titik panas terbanyak se-Indonesia yaitu dengan jumlah titik api sebesar 2.282. Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes di tahun 2019, tercatat bahwa ada lebih dari 100.000 orang yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap karhutla sebagai dampak dari kebakaran hutan yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan. Provinsi Jambi sendiri merupakan salah satu Provinsi yang terkena dampak cukup parah dari kegiatan pembakaran hutan secara ilegal ini di mana

pemerintah setempat sampai harus mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah dikarenakan kabut asap yang cukup tebal menyelimuti daerah ini. Akibat dari kebakaran lahan yang ada di Provinsi Jambi kualitas udara di sana menjadi sangat buruk dan tercemar dengan indeks standar pencemaran udara atau ISPU sebesar 106 sesuai dengan data pada tahun 2019 silam di bulan November di mana telah terjadi kabut asap besar besaran yang berdampak pada seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Menurut John Balmes, MD, seorang ahli paru UC San Francisco dan ahli efek pernapasan dan kardiovaskular dari polutan udara, anak kecil, orang tua serta orang yang memiliki kekebalan tubuh lemah lebih mudah terpengaruh oleh dampak buruk yang disebabkan oleh kabut dan asap.

Didasari oleh beberapa hal tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, terlebih permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang kompleks dan *holistic*. Penulis memanfaatkan perangkat penelitian berbentuk kuisisioner untuk mengukur *willingness to pay* masyarakat di Provinsi Jambi yang berkaitan mitigasi risiko kabut asap akibat kebakaran hutan. Subjek pada penelitian yaitu meliputi masyarakat Provinsi Jambi, dan data penelitian yang digunakan yaitu luasan lahan dan hutan yang terbakar di Provinsi Jambi. Penelitian ini juga mengukur valuasi ekonomi dengan menggunakan *contingent valuation method (CVM)*. CVM merupakan teknik untuk mengukur nilai barang publik dengan secara langsung menanyai orang-orang tentang nilai tempat yang mereka tinggali. Jika digunakan secara tepat, metode ini merupakan teknik paling tepat untuk mengestimasi nilai ekonomis suatu barang publik (Mitchell dan Carson, 1989; Tapvong dan Kruavan, 1997).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gravitiani et al., (2016) yang mengukur *willingness to pay* masyarakat Jawa Tengah Terhadap Mitigasi Perubahan Iklim menunjukkan bahwa jenis kelamin dan jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh pada *willingness to pay* terhadap pilihan mitigasi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Gravitiani, (2017) yang dilakukan untuk mengukur nilai *willingness to pay* untuk mitigasi risiko banjir di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang signifikan yang ditunjukkan oleh variabel jumlah tanggungan keluarga. Terjadi perbedaan pada variabel tingkat pendapatan, kepemilikan tanah/Kepemilikan rumah, dan tingkat pendidikan, yang juga tidak memberikan pengaruh pada tingkat kemauan masyarakat setempat membayar. Sedangkan dalam beberapa penelitian justru variabel tersebut memberikan pengaruh positif dalam mempengaruhi kemauan masyarakat mengorbankan sejumlah uang untuk upaya mitigasi. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat dalam mengorbankan sejumlah imbalan dalam perbaikan lingkungan.

Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sereenonchai (2020) yang mengukur tingkat kepercayaan atau *trust* responden dengan kemauan membayar untuk perlindungan diri dan manajemen risiko kabut asap yang dituangkan dalam penelitiannya mengenai persepsi risiko dan keamuan membayar untuk perlindungan diri terhadap polusi kabut asap di Provinsi Chiang Mai, Thailand Utara menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan atau *trust* responden terhadap media dan birokrasi memiliki pengaruh non-signifikan terhadap nilai *willingness to pay* masyarakat. Hal ini menjadi salah satu landasan ketertarikan peneliti terhadap variabel tersebut namun

dilihat dari perspektif yang berbeda yang lebih mengarah kepada tingkat kepercayaan masyarakat secara umum terhadap orang lain dan apakah hal ini akan memberikan pengaruh terhadap kemauan membayar dalam upaya mitigasi risiko kabut asap.

Dengan latar belakang fenomena dan risiko yang ditimbulkan oleh kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan, yang mana hal ini telah menimbulkan kerugian maupun dampak buruk terhadap berbagai kegiatan berkaitan dengan ekonomi maupun kegiatan sosial bermasyarakat dalam skala yang cukup besar. Salah satunya seperti tercemarnya kualitas udara yang ada di Provinsi Jambi sehingga masyarakat memiliki keterbatasan untuk beraktivitas di luar rumah maka peneliti mengkaji lebih lanjut hal ini dengan menimbang bagaimana persepsi masyarakat dan bagaimana kemauan mereka untuk berkorban dalam bentuk imbalan sebagai upaya mitigasi dalam menanggulangi risiko sebagaimana yang dituangkan dalam penelitian ini, dengan Judul “*Willingness to Pay* Mitigasi Risiko Kabut Asap yang disebabkan Kebakaran Hutan (Studi kasus di Provinsi Jambi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan yang harus terjawab dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Berapa estimasi *willingness to pay* mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh faktor pendapatan terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi?

3. Bagaimana pengaruh faktor pendidikan terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana pengaruh faktor usia terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi?
5. Bagaimana pengaruh faktor jumlah tanggungan keluarga terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi?
6. Bagaimana pengaruh faktor sikap skeptisme terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi?
7. Bagaimana pengaruh faktor pengalaman sebelumnya terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengestimasi berapa estimasi *willingness to pay* mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor pendapatan terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi.

3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor pendidikan terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor usia terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi.
5. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor jumlah tanggungan keluarga terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi
6. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor sikap skeptisme terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi.
7. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor pengalaman bencana kabut asap sebelumnya terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) mitigasi risiko kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Jambi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya ialah sebagai berikut :



1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dan sekaligus motivasi untuk meneliti dampak yang disebabkan oleh kabut asap akibat kebakaran hutan.
2. Manfaat teoritis dari penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Willingness To Pay* seseorang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik dari segi pengetahuan dan informasi baru bagi kalangan tertentu seperti akademisi, dosen, mahasiswa ataupun masyarakat secara umum yang memiliki keinginan untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan topik yang diangkat pada penelitian ini.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun informasi tambahan bagi pengkaji lingkungan hidup, khususnya mengenai permasalahan lingkungan berkaitan dengan kabut asap dan kebakaran hutan
5. Sebagai masukan dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini.